

Disparitas Antar Kecamatan Dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi

Nur Anim Jauhariyah

Abdul Kholiq Syafa'at

Nurul Inayah

Lely Ana Ferawati Ekaningsih

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Banyuwangi

nuranim_staida@yahoo.com

email: kholiq_sy@yahoo.com

email: inayahsyaikhoni@yahoo.co.id

lelyningsih@ymail.com

staida_bwi@yahoo.co.id

Abstract

The study was conducted 1) to Knowing the potential of each sector in Banyuwangi and 24 districts, 2) to analyze the economic disparity among districts in Banyuwangi. Analysis of the data used typology Klasen, Location Quotient (LQ), Analysis of Inter-District Disparities, Policy Analysis with Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis of the economic development strategy in Banyuwangi is as follows: Klassen Quotients result shows that the sector can be categorized as an advanced and fast-growing sector (primary sector) refers Agriculture and the sector is underdeveloped sectors of Manufacturing, Trade, Hotels and Restaurants, Transport and Communications, and Services. The results of the analysis of the seed sector LQ sectors have LQ values > 1 consists of Agriculture, mining and quarrying sector, and financial sector, leasing, and corporate services. The agricultural sector is a sector that is still contributing to economic growth in Banyuwangi. AHP analysis results to find policy solutions from primary data analysis indicates that the sector is still very optimistic about the potential and developed in accordance with the year Banyuwangi analysis is still optimistic on the agricultural sector, followed by hospitality sector saw the potential of tourism in Banyuwangi is still beautiful and clean, potential to be optimized to increase revenue Banyuwangi. The results of the analysis of disparities among districts using Williamson Index and Theil Entropy Index that Wongsorejo District, Muncar, Kalipur, and Licin possessed a relative index of inequality is higher than the other sub-districts.

Keywords: *disparities, policy strategies, the potential of the distric.*

PENDAHULUAN

Masalah utama dalam distribusi pendapatan antar wilayah adalah adanya disparitas/ketimpangan antara wilayah satu dengan lainnya. Disparitas antar kecamatan

menjadi masalah yang banyak dihadapi di setiap kabupaten karena potensi setiap kecamatan berbeda satu sama lain sehingga menyebabkan distribusi pendapatan mengalami ketimpangan antara

kecamatan yang potensial dan terbelakang. Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajad Kuncoro, 2004 :110).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 6,22 persen, tahun 2011 naik menjadi 6,38 persen. Walau masih berada di bawah Jatim, ekonomi Banyuwangi terus tumbuh dengan fundamental yang makin kuat. Terbukti pada Tahun 2009, ekonomi Banyuwangi lebih tahan terhadap krisis, dengan dukungan sektor riil. Perekonomian Banyuwangi masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 45,12 persen (Bappeda, 2012). Angka pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi di dapat dari analisis data sekunder masing-masing sektor ekonomi yaitu: 1) sektor pertanian; 2) petambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas, dan air bersih; 5) bangunan; 6) perdagangan, hotel dan restoran; 7) pengangkutan dan komunikasi; 8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 9) jasa-jasa. Namun di dalam analisis pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi tidak memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi dan angka ketimpangan pembangunan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, penting halnya untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan menganalisis integrasi antar aspek pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dengan melihat pertumbuhan ekonomi antarkecamatan sehingga kebijakan strategi pembangunan diarahkan pada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Analisis sektor unggulan dan penemuan wilayah pusat pertumbuhan yang diperoleh melalui analisis penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya sebagai kontribusi arah kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar. Sumberdaya yang bervariasi antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dapat diklasifikasikan dengan tepat dan mengungkap permasalahan apa yang menjadi problematika di setiap kecamatan sehingga ketimpangan antar kecamatan dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang menjadi komoditi potensial.

Dalam upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, penting halnya untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan menganalisis

integrasi antar aspek pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dengan melihat pertumbuhan ekonomi antarkecamatan sehingga kebijakan strategi pembangunan diarahkan pada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Analisis sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya sebagai kontribusi arah kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi sehingga disparitas pendapatan antar kecamatan dapat diminimalisir dengan peningkatan potensi di kecamatan-kecamatan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Ketimpangan Ekonomi antar Daerah

Williamson (1965) (dalam Kuncoro, 2004:133) meneliti bahwa hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi Negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang” dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Ketimpangan pembangunan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan Indeks Ketimpangan Williamson (Sjarizal, 1997) (dalam Kuncoro, 2004:133):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB perkapita di kecamatan i

Y = PDRB perkapita rata-rata Kabupaten Banyuwangi

f_i = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi

Menurut Kuncoro (2002), konsep Entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, serta distribusi produk domestik bruto dunia.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, Ying (2000) (dalam Kuncoro, 2004:134) menggunakan indeks Theil. Indeks Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Dengan menggunakan analisis Indeks Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Rumus Indeks Theil adalah sebagai berikut.

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_i}{Y} \right) x \log \left[\left(\frac{y_i}{Y} \right) / \left(\frac{x_j}{X} \right) \right]$$

Dimana:

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil

y_j = PDRB Perkapitan kecamatan j
 Y = PDRB Perkapita
 Kabupaten Banyuwangi
 x_j = Jumlah penduduk kecamatan j
 X = Jumlah penduduk
 Kabupaten Banyuwangi

Indeks Entropi Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil, pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial.

Indeks Entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. Hal tersebut sejalan dengan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ketimpangan entropi Theil tidak memiliki batas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya, maka semakin timpang dan semakin kecil, semakin merata.

Strategi Pembangunan Berbasis Keuntungan Kompetitif Daerah

Strategi pembangunan ekonomi daerah seharusnya didasarkan pada prinsip *Keuntungan Kompetitif* (Competitive Advantage) sebagaimana dimaksud oleh Michael E. Porter (2001) (dalam Syafrizal, 2008). Berbeda dengan konsep *Keuntungan Komparatif* (Comperative Advantage)

yang telah bersifat tradisional didasarkan pada perbedaan kandungan sumberdaya yang dimiliki (resource endowment), konsep Keuntungan Kompetitif ini lebih didasarkan pada unsur kreativitas, teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang dikombinasikan untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi. Dengan demikian dapat saja terjadi suatu negara atau daerah yang tidak mempunyai kandungan sumberdaya alam yang memadai, dapat berkembang pesat karena kelebihanannya dari segi kreativitas, teknologi dan kualitas sumberdaya manusia.

Dengan menggunakan konsep *Keuntungan Kompetitif* tersebut sebagai dasar, prioritas pembangunan ekonomi daerah haruslah diletakkan pada sektor-sektor mempunyai Keuntungan Kompetitif tinggi yang tidak hanya didasarkan pada kandungan sumberdaya alam yang dimiliki, tetapi juga memperhatikan kemampuan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh sektor yang bersangkutan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan oleh suatu daerah akan mempunyai daya saing cukup tinggi karena didukung oleh potensi spesifik yang dimiliki daerah bersangkutan. Keadaan tersebut selanjutnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat karena produk yang dihasilkan akan dapat menguasai pasar sehingga kegiatan produksi dapat berkembang dengan baik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo,

Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin, Banyuwangi, Giri,, Kalipuro, dan Wongsorejo

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian diskriptif dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis sektor potensi unggulan, analisis disparitas antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan 24 kecamatan, data diambil dari 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah *pertama* mengetahui potensi-potensi setiap sektor di Kabupaten Banyuwangi dan 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, dengan tujuan supaya kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi bisa diarahkan ke potensi yang secara analisis merupakan basis dari daerah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga kebijakan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) dengan mengoptimalkan potensi yang dapat diperbaharui (*renewable*) dalam menopang kesejahteraan masyarakat.

Fokus *kedua* adalah untuk menganalisis disparitas ekonomi antarkecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan kondisi secara spasial yang berbeda satu sama lain

maka akan dianalisis penyebab-penyebab disparitas antarkecamatan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga solusi-solusi praktis bisa dikonstruksikan kepada dinas-dinas terkait untuk membuat suatu kebijakan demi kesejahteraan masyarakat secara merata.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kuisisioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden penelitian. Kuisisioner didapatkan dari menganalisis Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi dan Produk Domesik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan kemudian dianalisis secara LQ dan sektor/subsektor yang nilai $LQ > 1$ dijadikan indikator dan alternatif dalam kuesioner yang selanjutnya disebarkan ke responden yang dianggap *expert* dan hasilnya dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan digunakan sebagai analisis kebijakan untuk menentukan sektor potensial menurut *expert*.
- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama lama (Bungin, 2007). Dalam wawancara ini, peneliti mendatangi responden yaitu dari Camat/Sekretaris Camat/Kasi PMD (Pemberdayaan

- Masyarakat dan Desa) di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi untuk menghimpun informasi terkait potensi/produk unggulan yang menjadi potensi dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi disamping mengisi kuesioner penelitian.
- c. Observasi dengan pengamatan langsung di lapangan untuk memperkuat data penelitian sehingga fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung bisa terpantau oleh peneliti.
 - d. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan fenomena di lapangan yang tidak *tercover* pada data primer sehingga hasil penelitian lebih hidup dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dokumentasi setiap kali berkunjung ke masing-masing responden dan kecamatan yang dijadikan obyek penelitian.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dari hasil analisis kuisisioner yang disebarkan dan diisi oleh responden penelitian yang dianggap *expert* yaitu dari BPS Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, Camat/Sekretaris Camat/Kasi PMD

(Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, responden pemerhati perkembangan perekonomian dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi, dan Dosen Perguruan Tinggi yang *expert* di bidang ekonomi.

- b. Data sekunder didapatkan dari hasil analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur menurut sektor ekonomi 2000-2011 ADHK Tahun 2000.
- c. Data sekunder didapatkan dari hasil analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menurut sektor ekonomi Tahun 2009-2010.

Analisis Data

a. Tipologi Klassen

Analisis tipologi klasen digunakan mengidentifikasi posisi perekonomian daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya. Mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi unggulan suatu daerah. Mencari Rata-rata Pangsa dan Rata-rata Pertumbuhan di Kabupaten Banyuwangi. Karena data PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2011 maka untuk PDRB Provinsi Jawa Timur juga diambil data tahun 2000-2011 untuk kesinkronan analisis data. Analisis Tipologi Klassen membandingkan rata-rata pangsa dan rata-rata pertumbuhan setiap sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Tipologi Klassen untuk melihat posisi perekonomian di masing-masing kecamatan, karena data di kecamatan hanya ada 2 tahun yaitu Tahun 2009 dan 2010 maka analisis dilakukan dengan data yang tersedia di lapangan.

b. *Location Quotient (LQ)*

Formula untuk *Location Quotient (LQ)* adalah:

$$LQ_{ik} = \frac{V_{ik}/V_k}{V_{ip}/V_p}$$

Keterangan:

V_{ik} = Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi k (kabupaten Banyuwangi) dalam pembentukan Produk Domestik Riil (PDRB) daerah studi k.

V_k = Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah studi k.

V_{ip} = Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi p (Provinsi Jawa Timur) dalam pembentukan Produk Domestik Riil (PDRR) daerah studi p.

V_p = Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah referensi p.

Untuk analisis LQ menggunakan data PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2011 maka untuk PDRB Provinsi Jawa Timur juga diambil data tahun 2000-2011 untuk kesinkronan analisis data. Sedangkan untuk LQ setiap kecamatan, karena data di kecamatan hanya ada 2 tahun yaitu Tahun 2009 dan 2010 maka disinkronkan untuk PDRB Kabupaten juga diambil Tahun 2009 dan 2010.

Hasil analisis LQ pada sektor atau subsektor akan dijadikan sebagai indikator untuk membuat kuesioner yang selanjutnya disebarkan pada responden yang dianggap *expert* dalam menanggapi dan memilih potensi yang dianggap potensial di Kabupaten Banyuwangi dan 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

c. **Analisis Disparitas Antar Kecamatan**

1) Indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan

Indeks Ketimpangan Williamson (Sjarizal, 1997) (dalam Kuncoro, 2004:133):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i = PDRB perkapita di kecamatan i

Y = PDRB perkapita rata-rata Kabupaten Banyuwangi

f_i = jumlah penduduk di kecamatan i

n = jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi

2) Analisis Indeks Entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Rumus Indeks Theil adalah sebagai berikut.

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_i}{Y} \right) \times \log \left[\frac{y_i}{Y} / \frac{x_j}{X} \right]$$

Dimana:

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil

y_j = PDRB Perkapita kecamatan j

Y = PDRB Perkapita

Kabupaten Banyuwangi

x_j = jumlah penduduk kecamatan j

X = jumlah penduduk

Kabupaten Banyuwangi

Analisis Williamson dan Indeks Entropi Theil digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar kecamatan yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Data yang digunakan untuk analisis adalah PDRB masing-masing Kecamatan pada Tahun 2009 dan 2010.

d. **Analisis Kebijakan**

Analytical Hierarchy Process (AHP)

analisis untuk mengetahui respon dari responden yang *expert* dibidangnya untuk dijadikan responden sebagai penentu kebijakan yang tepat guna pengembangan pusat wilayah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. *Analytical Hierarchy Process* (AHP) telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970 dalam bukunya yang berjudul *The Analytic Hierarchy Process* pada tahun 1980 (Widodo, 2006:220-221).

Proses ini berkaitan dengan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Pengambilan keputusan dimulai dengan menentukan hirarki keputusan keseluruhan. Hirarki menunjukkan faktor-faktor yang diperhitungkan dan juga berbagai alternatif perhitungan. Prinsip *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) *Decomposition*, memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya.
- 2) *Comparative Judgement*, penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya.
- 3) *Synthesis of Priority*, adalah mencari *Eigent Vector* dari setiap matrik *pairwise comparison* untuk memperoleh *local priority*.
 - (a) *Local consistency*,
 - (1) Objek-objek yang serupa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi;
 - (2) Tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.
 - (b) Tahapan dalam AHP
 - (1) Menentukan tujuan/*goal/objectives*
 - (2) Menentukan kriteria
 - (3) Memilih *alternative*

Hasil analisis AHP akan dijadikan acuan untuk membuat suatu kebijakan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah demi kepentingan mengurangi disparitas ekonomi masing-masing kecamatan dan mengoptimalkan potensi keunggulan di masing-masing kecamatan dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Strategi Pembangunan Ekonomi

a. Hasil Analisis Tipologi Klassen

Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat (sektor prima) adalah Sektor Pertanian, sektor inilah yang sebaiknya mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah untuk dikembangkan. Sementara Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan masuk pada kategori sektor maju tapi tertekan (Sektor Potensial). Sektor yang berpotensi untuk Berkembang adalah sektor Kontruksi dan Listrik, gas, dan air bersih. Sektor tertinggal di Kabupaten Banyuwangi adalah Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, dan Jasa – jasa.

Hasil pemetaan dari analisis Tipologi Klassen pada Tabel. 1. bila dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi dimasa datang, antara lain dapat dilakukan dengan strategi dari 9 (sembilan) sektor yang ada. Sektor yang dikembangkan adalah sektor yang merupakan sektor prima

atau menjadi sektor prioritas di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1. Matrik Tipologi Klasen Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000 – 2011

	Tumbuh Cepat	Tumbuh Lambat	
Kontribusi Besar	Sektor Pertanian Prima	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan Potensial	Kontribusi Besar
Kontribusi Kecil	1. Kontruksi 2. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1. Industri Pengolahan, 2. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 3. Pengangkutan dan Komunikasi 4. Jasa-jasa Terbelakang	Kontribusi Kecil
	Tumbuh Cepat	Tumbuh Lambat	

Analisis Tipologi klasen untuk melihat posisi ekonomi di masing-masing kecamatan dari hasil analisis PDRB Kecamatan pada Tahun 2009 dan 2010 dan jumlah pendapatn perkapita dan jumlah penduduk menggambarkan bahwa posisi perekonomian di semua kecamatan di Kabupaten Banyuwangi berada pada kuadran I yaitu cepat maju dan cepat tumbuh.

b. Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil analisis Location Quotient (LQ) PDRB Kabupaten Banyuwangi dan PDRB Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha Tahun 2000-2011 ADHK 2000 dengan hasil analisis bahwa sektor tradisional (*primer*-pertanian) lebih potensial dibandingkan sektor lainnya. Sektor unggulan yaitu sektor yang memiliki nilai LQ>1 terdiri dari 1) Sektor Pertanian sebesar 2,80; 2) Sektor Pertambangan dan penggalian 2,12; dan 3) Sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 1,23.

Hasil analisis Location Quotient (LQ) menurut Subsektor PDRB Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Tanaman Bahan Makanan sebesar 2,958
- 2) Tanaman Perkebunan sebesar 4,006
- 3) Peternakan dan Hasil-hasilnya sebesar 2,226
- 4) Kehutanan sebesar 7,677
- 5) Perikanan sebesar 4,358
- 6) Pertambangan tanpa Migas sebesar 10,805
- 7) Penggalian sebesar 1,474
- 8) Hotel sebesar 1,237
- 9) Angkutan Rel sebesar 1,995
- 10) Angkutan Laut sebesar 7,564
- 11) Angkutan Sungai, Danau sebesar 40,543
- 12) Sewa Bangunan sebesar 1,567

Untuk indeks subsektor LQ sama dengan satu atau lebih mengandung pengertian bahwa, penduduk di Kabupaten Banyuwangi dapat memenuhi kebutuhan akan suatu barang dengan hasil industri sendiri atau bahkan sudah mampu mengeksport atau mengirim hasil industri tersebut ke luar Kabupaten Banyuwangi. Jadi Kabupaten Banyuwangi berspesialisasi dalam memproduksi sektor dengan nilai LQ>1 dari pada sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, terlihat dari kontribusinya yang dominan (LQ>1) terhadap pendapatan daerah, dilanjutkan dengan sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedang sektor yang bernilai LQ<1 adalah sektor yang tidak

berspesialisasi dalam memproduksi sektor tersebut dibandingkan dengan sektor serupa di Provinsi Jawa Timur.

c. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) PDRB Kecamatan Tahun 2009 – 2010

Untuk menganalisis potensi unggulan di setiap sektor atau sub sektor di masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menggunakan analisis *Location Quotient*. Dari hasil lapangan didapatkan PDRB Kecamatan hanya ada dua tahun analisis. Hasil analisis *Location Quotient* (LQ) PDRB Kecamatan Tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Nilai *Location Quotient* 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

Sektor / Subsektor	Kecamatan	
	LQ Tertinggi (LQ>1)	LQ Terendah (LQ<1)
1. Pertanian	Wongsorejo	Banyuwangi
2. Pertambangan dan Penggalian	Licin	Pesanggaran, Bangorejo, Tegaldimo, Muncar, Songgon, Banyuwangi, Giri, Kalipuro, Tegalsari, Glenmore, dan Singojuruh
3. Industri Pengolahan	Muncar	Tegalsari
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	Banyuwangi	Licin
5. Bangunan	Giri	Wongsorejo
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Genteng	Licin
7. Pengangkutan dan Komunikasi	Kalipuro	Licin
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Glagah	Siliragung
9. Jasa-jasa	Genteng	Wongsorejo

(Sumber: PDRB Kecamatan Tahun 2009-2010, diolah)

Keterangan Tabel:

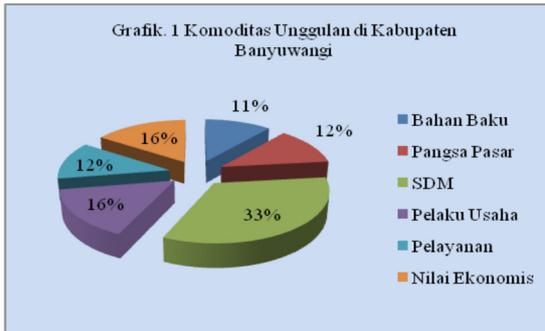
- 1) Sektor potensial di Kecamatan Wongsorejo adalah sektor pertanian

dan kebalikannya adalah Kecamatan Banyuwangi.

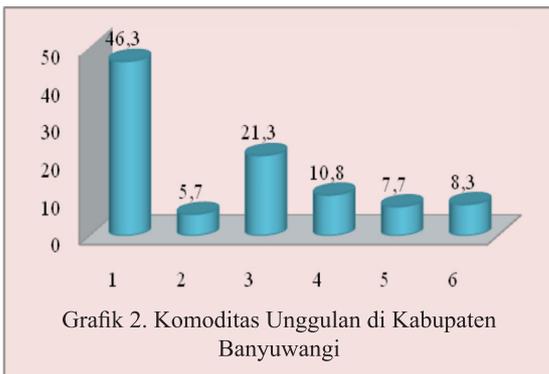
- 2) Sektor potensial di Kecamatan Licin adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, karena kecamatan tersebut memiliki pertambangan belerang.
- 3) Subsektor Listrik dan Air bersih banyak dipergunakan oleh masyarakat Kecamatan Banyuwangi.
- 4) Kecamatan yang melakukan transaksi perdagangan yang tinggi secara data berada di Kecamatan Genteng.
- 5) Kecamatan Kalipuro memiliki nilai kontribusi besar pada subsektor Pengangkutan Laut karena mengingat satu-satunya pelabuhan besar yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali berada di Desa Ketapang.
- 6) Kecamatan Genteng memiliki kontribusi yang tinggi pada sektor Jasa-jasa dan kebalikannya adalah Kecamatan Wongsorejo.

d. Hasil Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) di Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang menggunakan *software expert choice* untuk menganalisis potensi di Kabupaten Banyuwangi menurut responden yang berasal dari BPS Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi, responden pemerhati perkembangan perekonomian dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi, dan Dosen Perguruan Tinggi yang *expert* di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:



Menurut versi responden *expert* peran SDM dalam menentukan potensi suatu daerah sangat penting, melihat proporsinya sebesar 33.5%. Hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk Kabupaten Banyuwangi menurut sektor potensial adalah sebagai berikut:



Grafik 2. Keterangan Grafik:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Perhotelan
4. Pengangkutan Rel Sungai Danau dan Laut
5. Sewa Bangunan
6. Jasa Pemerintahan Umum

Hasil analisis AHP membuktikan bahwa Sektor pertanian memiliki prosentase tertinggi yaitu 46,3% dan yang terkecil adalah subsektor Sewa Bangunan. Sektor

pertanian di Kabupaten Banyuwangi didominasi tanaman pangan yaitu Padi. Jadi sektor pertanian masih menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banyuwangi.

1. Analisis Disparitas dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan

a. Hasil analisis Indeks Ketimpangan Williamson data PDRB antar kecamatan Tahun 2009 dan 2010

Hasil analisis PDRB Kecamatan Tahun 2009 dan 2010 untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

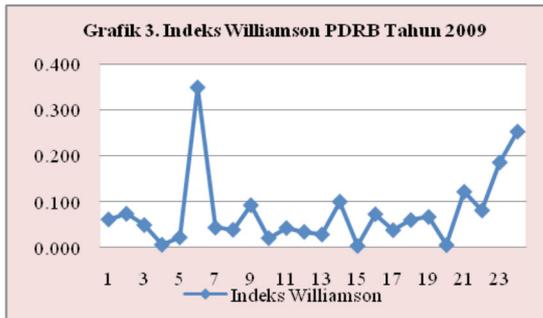
Tabel 3. Indeks Williamson Antar Kecamatan Tahun 2009 dan 2010

No.	Kecamatan	Indeks Williamson Tahun 2009	Indeks Williamson Tahun 2010
1.	Pesanggaran	0,062	0,060
2.	Siliragung	0,074	0,074
3.	Bangorejo	0,050	0,046
4.	Purwoharjo	0,007	0,001
5.	Tegaldlimo	0,023	0,023
6.	Muncar	0,349	0,359
7.	Cluring	0,044	0,043
8.	Gambiran	0,039	0,036
9.	Tegalsari	0,093	0,091
10.	Glenmore	0,021	0,022
11.	Kalibaru	0,043	0,048
12.	Genteng	0,035	0,030
13.	Srono	0,029	0,032
14.	Rogojampi	0,100	0,108
15.	Kabat	0,004	0,001
16.	Singojuruh	0,073	0,074
17.	Sempu	0,039	0,044
18.	Songgon	0,060	0,060
19.	Glagah	0,067	0,067
20.	Licin	0,006	0,005
21.	Banyuwangi	0,122	0,130
22.	Giri	0,081	0,081
23.	Kalipuro	0,186	0,187
24.	Wongsorejo	0,253	0,255

Sumber data: PDRB Kecamatan Tahun 2009 dan 2010, diolah

Hasil analisis indeks Williamson di masing-masing kecamatan pada Tahun 2009 dan 2010, ada kecamatan yang mengalami kenaikan dan ada yang menurun nilai ketimpangannya.

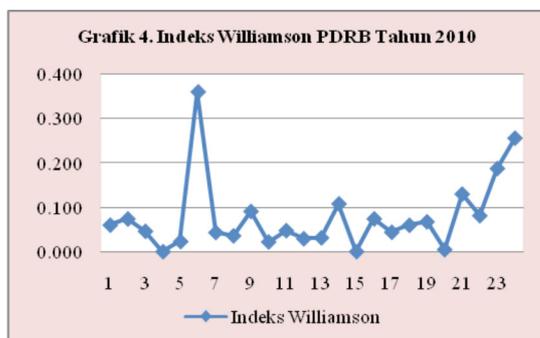
Adapun Grafik indeks Williamson Pada Tahun 2009 setiap kecamatan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pesanggaran | 13. Srono |
| 2. Siliragung | 14. Rogojampi |
| 3. Bangorejo | 15. Kabat |
| 4. Purwoharjo | 16. Singojuruh |
| 5. Tegaldlimo | 17. Sempu |
| 6. Muncar | 18. Songgon |
| 7. Cluring | 19. Glagah |
| 8. Gambiran | 20. Licin |
| 9. Tegalsari | 21. Banyuwangi |
| 10. Glenmore | 22. Giri |
| 11. Kalibaru | 23. Kalipuro |
| 12. Genteng | 24. Wongsorejo |

Grafik indeks Williamson antar kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pesanggaran | 13. Srono |
| 2. Siliragung | 14. Rogojampi |
| 3. Bangorejo | 15. Kabat |
| 4. Purwoharjo | 16. Singojuruh |
| 5. Tegaldlimo | 17. Sempu |
| 6. Muncar | 18. Songgon |
| 7. Cluring | 19. Glagah |
| 8. Gambiran | 20. Licin |
| 9. Tegalsari | 21. Banyuwangi |
| 10. Glenmore | 22. Giri |
| 11. Kalibaru | 23. Kalipuro |
| 12. Genteng | 24. Wongsorejo |

Pada Tahun 2009 hasil analisis menunjukkan Kecamatan Muncar memiliki nilai ketimpangan yang paling tinggi yaitu 0.349 dan naik pada tahun 2010 yaitu 0.359 diikuti Kecamatan Wongsorejo yaitu 0,253 dan meningkat pada Tahun 2010 menjadi 0,255 dan Kalipuro 0.186 dan meningkat menjadi 0.187 Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

- 1) Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.
- 2) Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

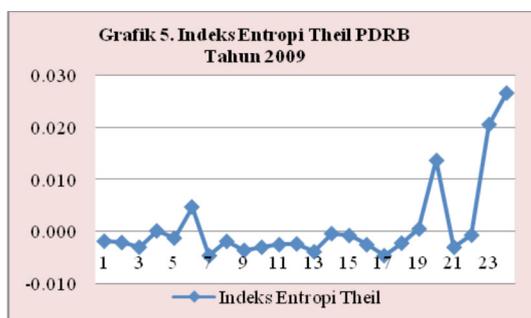
b. Hasil analisis Indeks Entropi Theil data PDRB antar kecamatan Tahun 2009 dan 2010

Tabel 4. Indeks Entropi Theil Antar Kecamatan Tahun 2009 dan 2010

No.	Kecamatan	Indeks Entropi Theil Tahun 2009	Indeks Entropi Theil Tahun 2010
1.	Pesanggaran	-0,0018	-0,0015
2.	Siliragung	-0,0021	-0,0020
3.	Bangorejo	-0,0030	-0,0025
4.	Purwoharjo	0,0001	0,0000
5.	Tegaldlimo	-0,0012	-0,0011
6.	Muncar	0,0047	0,0049
7.	Cluring	-0,0046	-0,0044
8.	Gambiran	-0,0019	-0,0015
9.	Tegalsari	-0,0036	-0,0035
10.	Glenmore	-0,0030	-0,0029
11.	Kalibaru	-0,0025	-0,0030
12.	Genteng	-0,0024	-0,0026
13.	Srono	-0,0039	-0,0035
14.	Rogojampi	-0,0004	0,0003
15.	Kabat	-0,0008	-0,0007
16.	Singojuruh	-0,0025	-0,0021
17.	Sempu	-0,0046	-0,0047
18.	Songgon	-0,0022	-0,0018
19.	Glagah	0,0005	0,0004
20.	Licin	0,0137	0,0140
21.	Banyuwangi	-0,0030	-0,0024
22.	Giri	-0,0007	-0,0007
23.	Kalipuro	0,0205	0,0150
24.	Wongsorejo	0,0266	0,0250

Sumber data: PDRB Kecamatan Tahun 2009 dan 2010, diolah

Adapun Grafik indeks Entropi Theil pada Tahun 2009 setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

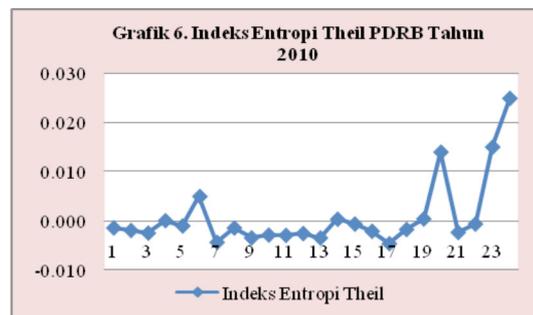


Keterangan:

- 1. Pesanggaran
- 2. Siliragung
- 3. Bangorejo
- 4. Purwoharjo
- 13. Srono
- 14. Rogojampi
- 15. Kabat
- 16. Singojuruh

- 5. Tegaldlimo
- 6. Muncar
- 7. Cluring
- 8. Gambiran
- 9. Tegalsari
- 10. Glenmore
- 11. Kalibaru
- 12. Genteng
- 17. Sempu
- 18. Songgon
- 19. Glagah
- 20. Licin
- 21. Banyuwangi
- 22. Giri
- 23. Kalipuro
- 24. Wongsorejo

Adapun Grafik indeks Entropi Theil pada Tahun 2010 setiap kecamatan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- 12. Pesanggaran
- 13. Siliragung
- 14. Bangorejo
- 15. Purwoharjo
- 16. Tegaldlimo
- 17. Muncar
- 18. Cluring
- 19. Gambiran
- 20. Tegalsari
- 21. Glenmore
- 22. Kalibaru
- 12. Genteng
- 13. Srono
- 14. Rogojampi
- 15. Kabat
- 16. Singojuruh
- 17. Sempu
- 18. Songgon
- 19. Glagah
- 20. Licin
- 21. Banyuwangi
- 22. Giri
- 23. Kalipuro
- 24. Wongsorejo

Dari hasil analisis PDRB Kecamatan Tahun 2009 dan 2010 menggunakan indeks entropy theil menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki disparitas yang paling tinggi adalah Kecamatan Wongsorejo yaitu 0,0266 pada Tahun 2009 dan menurun pada Tahun 2010 sebesar 0,0250 diikuti dengan Kecamatan Kalipuro 0,0205 pada Tahun 2009 dan menurun menjadi 0,0150 pada Tahun 2010 dan Kecamatan Licin 0,0137 pada Tahun 2009 dan meningkat pada Tahun 2010 menjadi 0,0140. Nilai indeks

entropy theil tidak memiliki batas bawah sehingga nilai yang mendekati angka satu adalah daerah yang memiliki ketimpangan yang lebih tinggi.

c. Analisis PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan

Hasil analisis PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan Tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pesanggaran | 13. Srono |
| 2. Siliragung | 14. Rogojampi |
| 3. Bangorejo | 15. Kabat |
| 4. Purwoharjo | 16. Singojuruh |
| 5. Tegaldlimo | 17. Sempu |
| 6. Muncar | 18. Songgon |
| 7. Cluring | 19. Glagah |
| 8. Gambiran | 20. Licin |
| 9. Tegalsari | 21. Banyuwangi |
| 10. Glenmore | 22. Giri |
| 11. Kalibaru | 23. Kalipuro |
| 12. Genteng | 24. Wongsorejo |

Tahun 2009 dan 2010 Kecamatan yang memiliki nilai rata-rata pendapatan perkapita terbesar adalah Kecamatan Licin yaitu sebesar Rp. 15.112.679,- pertahun. Sedangkan kecamatan yang memiliki nilai pendapatan terkecil adalah Kecamatan Tegalsari Rp. 4.477.586,- pertahun.

Tabel 5. PDRB Perkapita dan Pertumbuhan 24 Kecamatan Tahun 2009 dan 2010

No.	Kecamatan	PDRB Perkapita Rata-rata	Pertumbuhan (%)
1.	Pesanggaran	5,928073	7,35
2.	Siliragung	5,574198	6,09
3.	Bangorejo	5,569357	8,47
4.	Purwoharjo	6,834042	3,14
5.	Tegaldlimo	6,334694	5,74
6.	Muncar	7,673292	7,59
7.	Cluring	4,977671	6,34
8.	Gambiran	6,068301	8,28
9.	Tegalsari	4,477586	9,24
10.	Glenmore	5,671900	5,46
11.	Kalibaru	5,587588	3,27
12.	Genteng	6,029519	4,19
13.	Srono	5,680855	7,26
14.	Rogojampi	6,800202	8,55
15.	Kabat	6,539668	8,12
16.	Singojuruh	5,445996	3,00
17.	Sempu	4,952826	2,67
18.	Songgon	5,775869	6,10
19.	Glagah	7,116718	6,78
20.	Licin	15,112679	6,92
21.	Banyuwangi	6,156835	8,42
22.	Giri	6,198854	8,69
23.	Kalipuro	11,506234	3,47
24.	Wongsorejo	13,106558	5,76

Sumber data: PDRB Kecamatan Tahun 2009 dan 2010, diolah

Nilai pertumbuhan pada tahun tersebut yang paling tinggi perumbuhannya adalah Kecamatan Tegalsari yaitu 9,24% dan kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi terkecil adalah Kecamatan Singojuruh sebesar 3,00%.

PENUTUP / SIMPULAN

Kesimpulan

a. Hasil analisis strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi sektor basis di Kabupaten Banyuwangi hasil analisis *Tipologi klassen* menunjukkan sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat (sektor

prima) adalah sektor Pertanian dan sektor yang terbelakang adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, dan Jasa-jasa.

- 2) Hasil analisis LQ sektor unggulan yaitu sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ terdiri dari sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan penggalian, dan Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, terlihat dari kontribusinya yang dominan terhadap pendapatan daerah. Potensi di masing-masing kecamatan pada sektor pertanian nilai LQ tertinggi di Kecamatan Wongsorejo, sektor Industri pengolahan di Kecamatan Muncar, sektor Listrik, Gas, dan Air bersih di Kecamatan Banyuwangi, sektor Bangunan di Kecamatan Giri, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Kecamatan Genteng, sector Pengangkutan dan Komunikasi di Kecamatan Kalipuro, sector Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan di Kecamatan Glagah, dan Sektor Jasa-jasa di Kecamatan Genteng.
- 3) Hasil analisis AHP untuk mencari solusi kebijakan dari analisis data primer mengindikasikan bahwa sektor yang masih sangat potensial dan optimis dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan potensi Kabupaten Banyuwangi dan masing-masing kecamatan masih optimis pada sektor pertanian kemudian

diikuti dengan sektor perhotelan melihat potensi wisata di Kabupaten Banyuwangi yang masih asri dan bersih yang sangat potensial untuk dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.

- b. Hasil analisis disparitas antar kecamatan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil bahwa Kecamatan Muncar, Wongsorejo, Licin, dan Kalipuro mempunyai indeks ketimpangan yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Hal ini disebabkan tingkat pendapatan perkapita di kecamatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan Tegalsari pendapatan perkapitanya relative paling rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Keterbatasan

- a. Penelitian ini hanya mencakup wilayah Kabupaten Banyuwangi
- b. Data sekunder PDRB kecamatan hanya tersedia dua periode yaitu Tahun 2009-2010
- c. Penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu 4 bulan.

Agenda Penelitian berikutnya

Agenda penelitian berikutnya adalah menganalisis penyebab disparitas di Kecamatan Muncar, Wongsorejo, Licin, Dan Kalipuro karena tiga kecamatan tersebut memiliki ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Banyuwangi.

Daftar Pustaka

- Bappeda. (2012). *PDRB Kabupaten Banyuwangi SMT I, Estimasi Tahun 2011*, Banyuwangi, Bappeda Kabupaten.
- BPS.(2011). *Banyuwangi Dalam Angka 2011*, Banyuwangi, BPS Kabupaten Banyuwangi.
- BPS Jawa Timur. (2001). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 1997-2000*, BPS Propinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2002). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 1998-2001*, BPS Propinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2004). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 2000-2003*, BPS Propinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2001). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 1997-2000*, BPS Propinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2005). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 2000-2004*, BPS Propinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2009). *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 2000-2008*, BPS Propinsi Jawa Timur.
- BPS Jawa Timur. (2011). *PDRB Provinsi Jawa Timur*, Surabaya, CV. Aneka Surya.
- Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta, Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jogjakarta, UPP STIM YKPN.
- Ratnaningsih, M., ddk. (2009). *PDRB Hijau*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sjafrizal, (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Padang, Baduouse Media, Cetakan Pertama.
- Suparmoko, M.(2006). *Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suparmoko, M. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Widodo. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*, Jogjakarta: UPP STIM YKPN.

PERNYATAAN / PENGHARGAAN

Terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi yang telah membiayai penelitian yang dipublikasikan dalam artikel ini. Artikel ini hasil Penelitian Hibah tahun 2012 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan STAIDA Banyuwangi dengan mengangkat judul penelitian **KAJIAN KEBIJAKAN PENENTUAN MAPPING SENTRA KOMODITAS UNGGULAN UNTUK PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANYUWANGI**